

Kata Pengantar



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LkjiP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2021
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi,

Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap, dengan indikatornya persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap, Capaian kinerja Dinas PUPR 76,51% Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 80,95%.
2. Sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan indikatornya Persentase Jaringan/Saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik, Target Capaian kinerja Dinas PUPR 76,89%, Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 85%.
3. Sasaran Tersedianya Sumber Air Baku Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Universal Akses, dengan indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan, Target Capaian kinerja Dinas PUPR 70,71%, Provinsi Jambi Pada Tahun 2020 adalah sebesar 92,75%.
4. Sasaran Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang layak, Indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan, capaian kinerja Dinas PUPR tahun 2020 75,60%, dan realisasi capaian Provinsi Jambi pada Tahun 2020 adalah sebesar 75%. Pada indikator Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%, capaian kinerja Dinas PUPR 20%, provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar 50%. Indikator Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat, capaian kinerja Dinas PUPR 67,63%, Capaian Provinsi Jambi pada Tahun 2020 sebesar 84%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Fungsi dan Tugas	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	6
1.6 Keuangan	7
1.7 Sistematisasi LKj IP	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020.....	15
2.4 Instrumen Pendukung.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis....	18
3.3 Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Struktur Organisasi	
Lampiran 2 Matriks Renstra 2016-2021	
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya	

Daftar Tabel

Tabel I.1	Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	6
Tabel I.2	Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Per 31 Desember 2019.....	6
Tabel 2.1	Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021....	10
Tabel 2.2	Sasaran Strategi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	12
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2.1	Capaian Realisasi Persentase Jalan Provinsi yang dalam Kondisi mantap Tahun 2020.....	18
Tabel 3.2.2	Capaian Persentase Jalan Provinsi yang Dalam Kondisi Mantap 3 Tahun Terakhir.....	19
Tabel 3.2.3	Capaian Realisasi Kinerja pada Sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Lainnya.....	20
Tabel 3.2.4	Capaian target berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya selama dari tahun 2018 sampai tahun 2020.....	20
Tabel 3.2.5	Capaian Realisasi Tersedianya Sumber Air Baku bagi Masyarakat untuk mendukung universal akses.....	21
Tabel 3.2.6	Capaian Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan 3 tahun terakhir.....	21
Tabel 3.2.7	Persentase Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak.....	23
Tabel 3.2.8	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan.....	24
Tabel 3.2.9	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 3 tahun terakhir.....	24
Tabel 3.2.10	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni (PSU) bagi Masyarakat 3 Tahun Terakhir	25
Tabel 3.3	Analisis efisiensi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020.....	28

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Jambi.....	2
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020.....	4
Gambar 1.3	Profil Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 1.4	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2020.....	5

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-isu strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas PUPR Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas PUPR Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas PUPR Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPR Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas PUPR Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat , yang kedua perlunya peningkatan peran pemerintah daerah kab/kota dalam pembangunan dan pemeliharaan aset, yang ketiga kesulitan dalam penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur dan yang keempat terbatasnya anggaran APBD yang tersedia.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup Pemerintah Provinsi dan Perangkatn pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah terbatasnya anggaran yang tersedia.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas PUPR Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas PUPR Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap
2. Berfungsinya jaringan irigasi,rawa,dan jaringan pengairan lainnya.
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak
5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas.

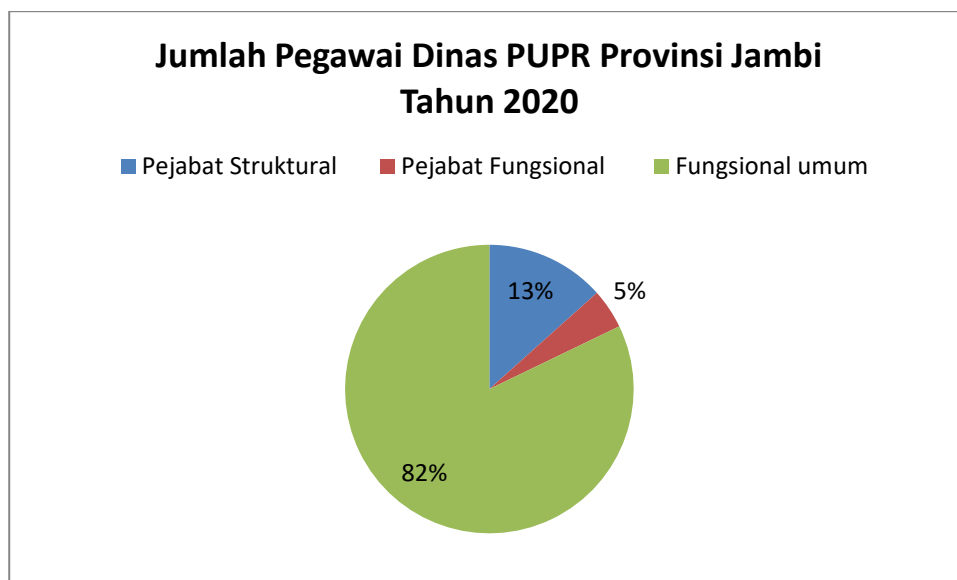
1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk PUPR, UPTD Workshop dan peralatan, dan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas PUPR Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 269 pegawai yang terdiri 36 pejabat struktural, 12 pejabat fungsional tertentu, dan 221 pejabat fungsional umum yang terbagi di Instansi Induk (Dinas PUPR Provinsi Jambi) dan pada UPTD Dinas PUPR.

Profil Kepegawaian Dinas PUPR Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

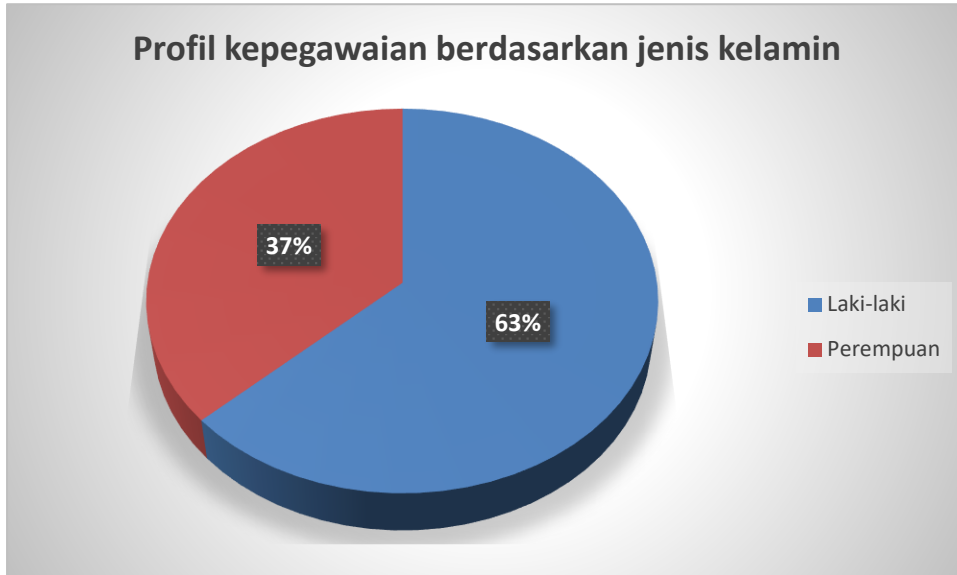
Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas PUPR Provinsi Jambi terutama untuk jabatan Pejabat fungsional yang sangat sedikit dibandingkan dengan pegawai fungsioanal umum. Diharapkan kedepannya untuk fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal dan menjadi pejabat fungsional pada bidang nya masing-masing sesuai kebutuhan formasi dinas.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

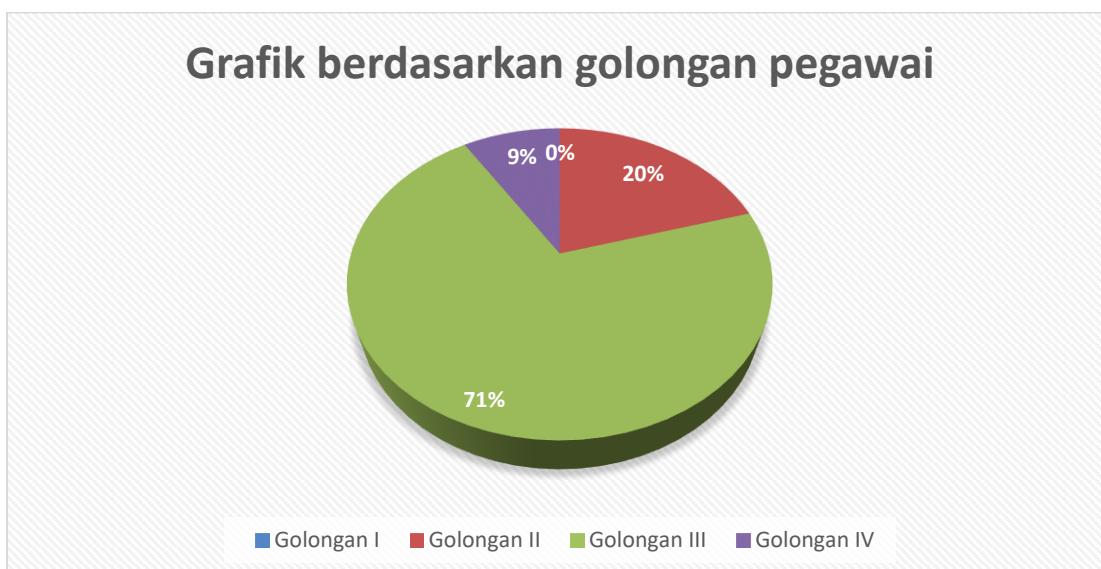
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jenis Kelamin Struktural Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020



Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2020

- Laki-laki : 170 Orang
- Perempuan : 99 Orang

Gambar 1.4. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020



Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020

- Golongan I : 0 Orang
- Golongan II : 55 Orang
- Golongan III : 190 Orang
- Golongan IV : 24 Orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas PUPR Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1

Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2020

No	Uraian	Banyak	Nilai/Input (Rp)	%
1	Tanah	93	83.416.287.161,33	
2	Peralatan dan Mesin	5.263	124.674.611.163,17	
3	Gedung dan Bangunan	46	78.100.974.887,01	
4	Jalan, Jaringan dan instalasi	3.225	7.089.577.599.719,22	
Jumlah s/d 31 Desember 2020		8.627	7.375.769.472.930,73	

Tabel I.2

Aset lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2020

No	Uraian	Banyak	Nilai/Input (Rp)	%
1	Aset Tetap lainnya	964	270.239.195.809,55	
2	Konstruksi dalam pengerjaan	43	64.140.394.476,86	
3	Aset lainnya	5.520	508.346.657.580,55	
Jumlah s/d 31 Desember 2020		6.527	842.726.247.866,96	

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2020 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2020 PUPR Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp910.182.949.479,16 dan setelah refofusing mengalami penurunan menjadi Rp 448.958.702.811,37 berkurang sebesar 50,67% dari anggaran yang telah disetujui diawal kegiatan dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 28.682.511.851,74 dan belanja langsung sebesar Rp 420.776.190.959,63 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 420.776.190.959,63 yang didukung oleh 22 program dan 82 kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2020 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Anggaran Tahun 2020
4. Instrumen Pendukung

Memasuki Tahun 2020, Dinas PUPR Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010-2015).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas PUPR Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2010-2015) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2016-2021). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2016-2021 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema “Jambi Tuntas”*. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2016-2021 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut,

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi
2016-2021**

Visi : Jambi Tuntas 2021 Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan provinsi		Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
					Persentase Jalan Provinsi Menuju Sentra Produksi dalam kondisi mantap
					persentase panjang jalan provinsi yang memiliki drainase
					Persentase pembangunan jembatan di Jalan Provinsi dalam kondisi baik
2		Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan		Berfungsinya jaringan irigasi,rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan / saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik
				Tersedianya Sumber Air Baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan
3		Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni		meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan
					Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%
					Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat
4		Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/Aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara profesional dan handal		meningkatkan kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	persentase angkatan kerja konstruksi yang telah disertifikasi profesi

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan Prasarana Jalan Provinsi.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana Jalan Provinsi
2. Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan
3. Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara professional dan handal.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
2. Berfungsinya jaringan irigasi,rawa, dan jaringan pengairan lainnya
3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak
5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja AKHIR PERIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi	1. Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	76,18%	77,64%	78,82%	79,89%	80,95%	82,52%
			Persentase Jalan Provinsi Menuju Sentra Produksi dalam Kondisi Mantap	74,59%	75,67%	76,75%	77,83%	78,91%	80%
			Persentase Panjang Jalan Provinsi yang memiliki drainase	35,47%	38,47%	41,47%	44,47%	47,47%	50,47%
			Persentase Pembangunan Jembatan di Jalan Provinsi dalam kondisi baik	87,28%	88,35%	89,42%	90,49%	91,56%	92,63%
2	Mewujudkan kualitas sumber daya air yang fungsional dan berkelanjutan	2. Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	73%	75%	78%	81%	85%	95%
		3. Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	67%	74%	80%	85%	92,75%	95%
3	Menurunkan kawasan lingkungan yang tidak layak huni	4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	65%	67%	70%	72%	75%	78%
			Persentase Pengurangan luas kawasan kumuh 0%	20%	25%	30%	40%	55%	70%
			Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	20%	36%	52%	68%	84%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja AKHIR PERIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas ke-PU-an serta SDM/Aparatur untuk terlaksananya tugas dan fungsi secara professional dan handal.	5. Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	Persentase angkatan kerja konstruksi yang telah disertifikasi profesi	5,80 %	15%	25%	35%	45%	52,20%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Pemenuhan standar mutu jalan, kuantitas dan kualitas peralatan operasional serta penanganan pembebasan lahan	peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi terutama akses menuju sentral produksi
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air	mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya; meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air
3	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	meningkatkan pemanfaatan sumber air baku	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku

4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak ; identifikasi data base sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman (TPA Regional, Pipa Sanitasi, dan Pengelolaan Limbah/IPAL) ; Peningkatan ketersediaan akan kebutuhan lingkungan layak huni bagi masyarakat
5	Meningkatnya kuantitas angkatan kerja konstruksi yang berkualitas	Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkatan kerja konstruksi	meningkatkan mutu angkatan kerja konstruksi melalui pelatihan tersertifikasi profesi

Sumber : Renstra Dinas PUPR tahun 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1 Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	80.95%
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	2 Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	85.00%
3.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	3 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	92.75%
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	4 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	75.00%
		5 Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	55.00%

		6	Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	84.00%
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	7	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2020

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas PUPR Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp910.182.949.479,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp32.385.863.882,16 dan Belanja Langsung Rp878.797.085.597,00,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi sebesar Rp 448.958.702,37,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 28.682.511.851,74,-,- dan Belanja Langsung Rp 420.776.190.959,63,-.

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas PUPR Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas PUPR Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Bab 3 berisi :

1. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	Persen	80,95	76,51	98,01	
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	Persen	85	76,89	90,45	
3	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	Persen	92,75	70,71	76,23	
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	Persen	75	75,60	100,8	
		Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	Persen	55,00	20	36,36	
		Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	Persen	84,00	67.34	80,16	

Sumber Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2020

Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki 1 (satu) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis PUPR Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, indikator sasaran tersebut sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai 80,33%**) dari total target dengan rata-rata persentase capaian keseluruhan 100% atau melampaui sebagian besar dari target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2020, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas PUPR Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 80,33%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap dengan indikator kinerjanya yakni persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap.

Sasaran ini dicapai melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi
- Kegiatan Rehab/pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi
- Perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv)
- Kegiatan Peningkatan jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Capaian Realisasi Persentase Jalan Provinsi yang dalam kondisi mantap Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	80,95	76,51	98,01

Capaian kinerja sasaran 1, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran ini telah memberikan rata – rata capaian kategori **sangat baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

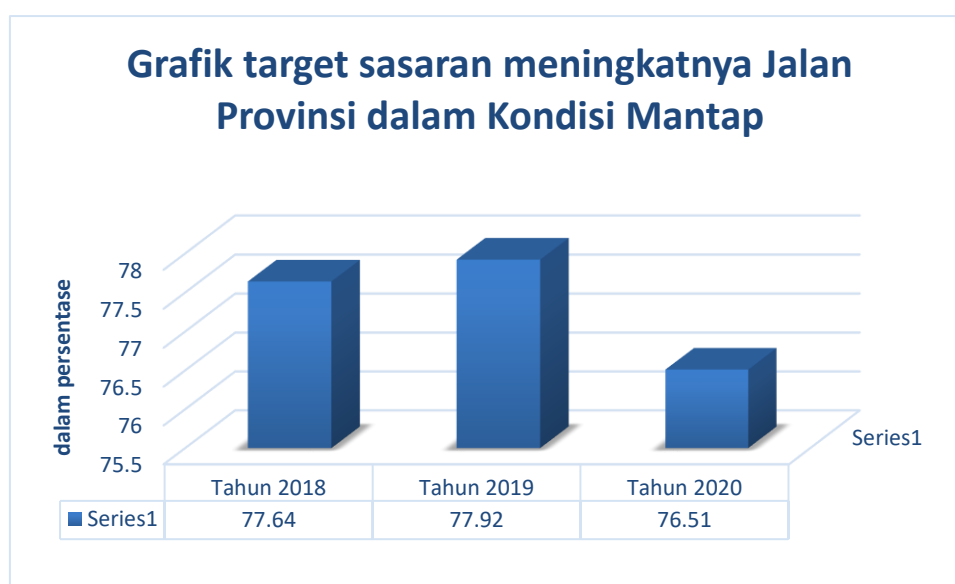
Tabel 3.2.2 Capaian Persentase Jalan Provinsi yang dalam kondisi mantap 3 tahun terakhir

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2020		
		2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	77,64	77,92	80,95	76,51	98,01

Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Diawal periode 2020 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program prioritas terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu :

1. Kemampuan teknis
2. Pengawasan yang baik
3. Matangnya perencanaan

Berikut merupakan grafik capaian target Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dari tahun 2018- 2020.



Pencapaian Target dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Sasaran #2 Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan Indikator kinerjanya berupa Persentase Jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik. Sasaran ini dicapai melalui program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Jaringan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Kegiatan Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Irigasi
- Kegiatan Rehabilitasi/reklamasi jaringan Rawa
- Kegiatan Rehabilitasi/Reklamasi Jaringan Rawa (DAK)

Capaian kinerja sasaran 2, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 2 (dua) ini telah memberikan capaian yang cukup baik mengalami peningkatan sedikit dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya faktor alam yaitu saluran irigasi yang dibangun terkena bencana longsor pada saluran primer limun singkut sepanjang 50 meter yang dimana telah direhab di tahun 2020. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

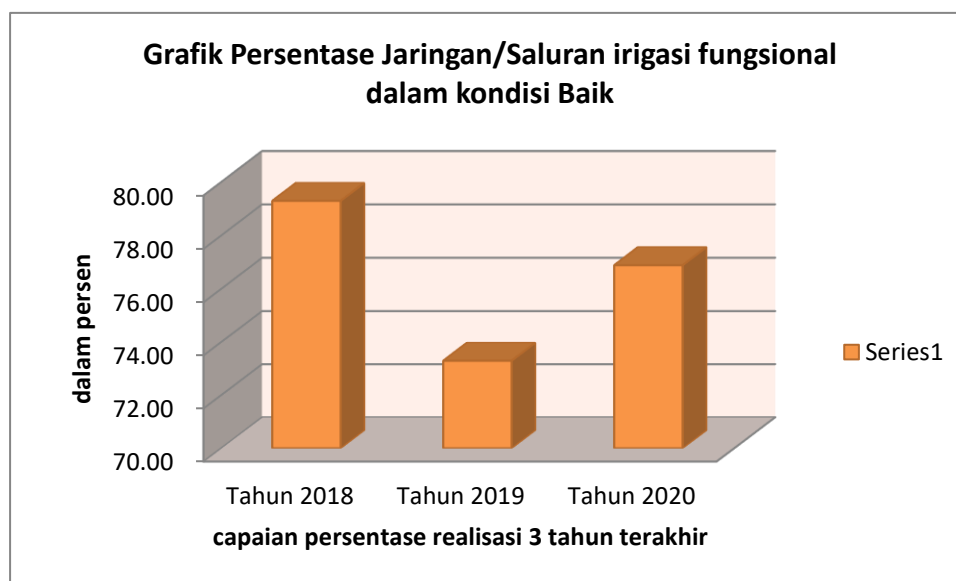
Tabel 3.2.3 Capaian Realisasi Kinerja Pada Sasaran Berfungsinya Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Berfungsinya Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	85%	76,89	90,45

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4. Capaian Target berfungsi jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya selama dari tahun 2018 sampai tahun 2020

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2020		
		2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	79,3	73,3	85	76,89	90,45



Pencapaian Target dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Sasaran #3 Tersedianya Sumber Air Baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal Akses dengan Indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan.

Sasaran ini dicapai melalui program Penyediaan dan Pengelolaan Air yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sumber Air Baku
- Penyediaan, Pengelolaan Air Minum dan Distribusi Jaringan Air Bersih.

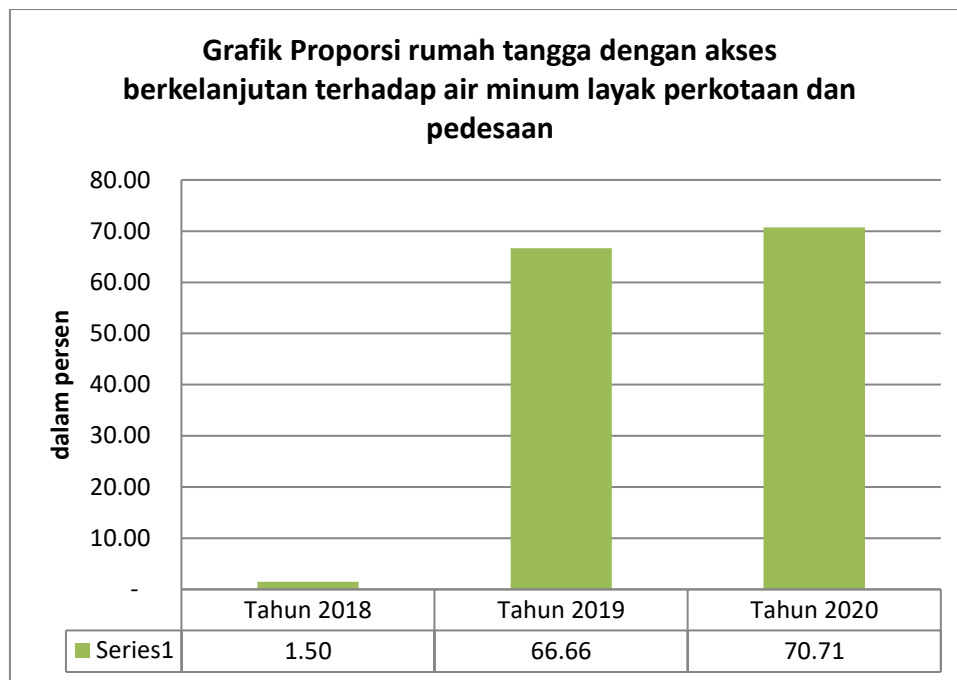
Capaian kinerja sasaran 3, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada sasaran 3 (tiga) ini meningkat dalam 3 tahun terakhir, Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5 Capaian Realisasi Tersedianya Sumber Air Baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Tersedianya Sumber Air Baku bagi masyarakat untuk mendukung Universal Akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan.	92,75	70,71	76,23

Tabel 3.2.6 Capaian Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan 3 tahun terakhir

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2020		
		2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan.	1,5	66,66	92,75	70,71	76,23



Pencapaian Target dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Sasaran #4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Lingkungan permukiman dan perumahan yang layak dengan indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan, persentase pengurangan luas kawasan kumuh, persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat.

Sasaran ini dicapai melalui program Pembangunan PSU perumahan dan permukiman di pusat kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dan Program pengembangan perumahan dan permukiman didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pembangunan PSU Perumahan Formal
- Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
- Perencanaan dan pengawasan bidang perumahan

Tabel 3.2.7 Persentase Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	75	75,60	100,8
		2. persentase pengurangan luas kawasan kumuh	55	20	36,36
		3. Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat.	84	67,34	80,16

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2020		
		2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	45,63	64,10	75	75,60	100,8
2	persentase pengurangan luas kawasan kumuh	0	20	55	20	36,36
3	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat.	22,94	59,06	84	67,34	80,16

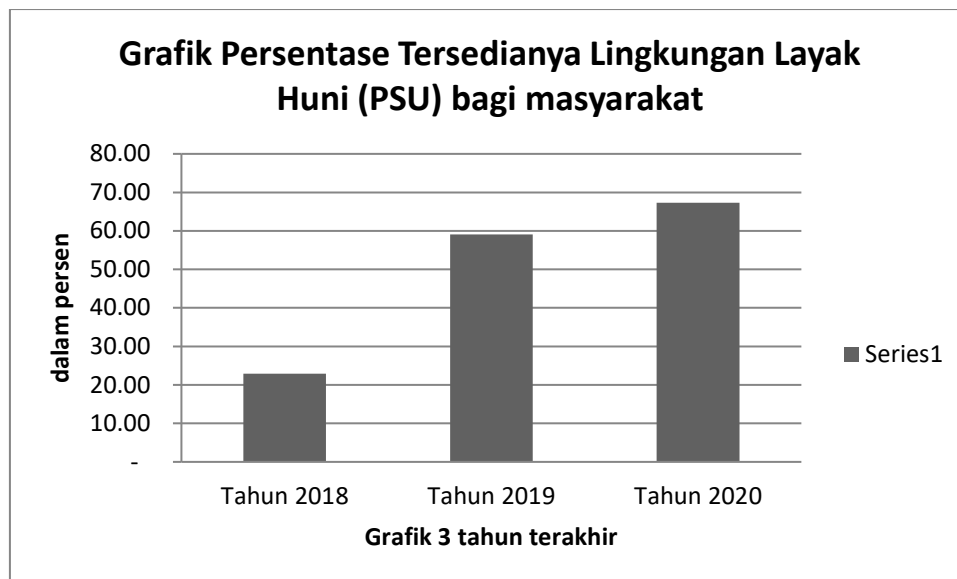
Pencapaian Target dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020



Tabel 3.2.8 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan



Tabel 3.2.9 Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 3 tahun terakhir



Tabel 3.2.10 Persentase Tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat 3 tahun terakhir

Bila dibandingkan dengan target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2020 realisasi Proporsi rumah dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2020 kami menampilkan realisasi pada tahun 2019 sama dengan data BPS susenas pada tahun 2019 yaitu 75,60 persen. Sampai dengan tahun 2020, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan rata rata mencapainya **sangat tinggi** sekitar 75,60 persen dari target 75% yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta serta penduduk yang telah mengerti tentang penggunaan sanitasi yang layak. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu aksesibilitas dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan dana APBN dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Persentase rumah kumuh di perkotaan merupakan target provinsi jambi. Bila dibandingkan dengan target, rata-rata persentase pengurangan luas kawasan kumuh **sangat rendah** dengan rata-rata capaiannya 36,36 persen yaitu 20 persen dari target 55 persen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2020. Langkah yang perlu diperhatikan dalam pengurangan luas kawasan kumuh tersebut, yaitu :

1. Pemerintah harus mampu mengurangi rumah tangga kumuh di perkotaan maupun di perdesan
2. Peranan masyarakat harus ditingkatkan melalui kegiatan – kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain – lain sebagainya.

3. Adanya Kordinasi yang baik dalam pendataan daerah kumuh yang harus segera direlokasi atau dilakukan pembangunan sarana dan prasarana yang layak

Persentase tersedianya lingkungan layak huni di ambil sampel penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas (PSU) yang tersedia dengan layak, pengaruh dan sangat signifikan terhadap kualitas hidup hunian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi terhadap target 80,16 persen persentase capaian kinerja tersebut diatas sudah masuk kategori **tinggi** atau sebesar 67.34 persen dari target 84 persen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Dalam 3 tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dari 2 tahun sebelumnya yaitu terdapat peningkatan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat yaitu :

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta
2. Tingkat kemiskinan
3. Pertumbuhan ekonomi

Langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan hunian layak bagi masyarakat yaitu ketersediaan prasarana umum hingga ke pelosok daerah, koordinasi antara pemerintah dan swasta (CSR), dan perlu adanya peraturan daerah terhadap kegiatan cooperate social responsibility (CSR) di Provinsi Jambi. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan hunian layak bagi masyarakat, melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan PSU Perumahan Formal.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp 407.318.668.243,- (96,80%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 276.209.993.511,- (66,81%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 139.644.120.126 (23,19%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 28.682.511.851,74 dengan realisasi anggaran 27.882.589.227,00 (97,21%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp 420.776.190.959,63 dengan realisasi anggaran sebesar 407.318.668.242,15 (96,80%);

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	80,95%	76,51	98,01	281.132.070.833	276.209.993.510,70	98,252
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	85,00%	76,89	90,45	2.441.573.420	2.424.754.020	99,31
3	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	92,75%	70,71	76,23	3.662.977.246	3.590.564.966,02	98,02
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	75,00%	75,60	100,8	5.512.971.770	5.250.298.191,27	95,24
		Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	55,00%	20	36,36	0	0	0
		Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	84,00%	67,34	80,16	5.529.325.602	5.361.993.901	96,97

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Analisis efisiensi Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	98,01	98,252	98,13
2	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	90,45	99,31	94,88
3	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	76,23	98,02	87,13
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	100,8	95,24	98,02
		Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 0%	36,36	0	
		Persentase tersediannya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	80,17	96,97	88,57

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 84,07%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

BAB 4

Bab 4 berisi :

4. *Kesimpulan*
5. *Rencana Tindak Lanjut*

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas PUPR Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya jalan Provinsi dalam kondisi mantap”, dengan indikator Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2020 adalah sebesar 76,51 % Realisasi kinerja Dinas PUPR telah melampaui mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 80,95%, dengan efisiensi anggaran sebesar 98,13%.
2. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Berfungsinya Jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya”, dengan indikator Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2020 adalah sebesar 76,89%, Realisasi kinerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 85%, dengan efisiensi anggaran sebesar 90,45%.
3. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses” realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2020 adalah 70,71%, Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 92,75%, dengan efisiensi anggaran sebesar 87,13%.
4. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kuantitas dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak”, dengan indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak perkotaan dan pedesaan, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2020 adalah sebesar 75,60%, Realisasi kerja Dinas PUPR sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 75%, dengan efisiensi anggaran sebesar 98,02%.
5. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kuantitas dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak”, dengan indikator Persentase pengurangan luas kawasan kumuh, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2020 adalah sebesar 20%, Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 55%, dengan efisiensi anggaran Nihil angka realisasi ini masih sama dengan Tahun 2019 dikarenakan di tahun 2020 karena adanya Recofusing anggaran yang sangat besar sehingga menyebabkan tidak tersedianya anggaran untuk program dan kegiatan penunjang sasaran ini.
6. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kuantitas dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak”, dengan indikator Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat, realisasi kinerja Dinas PUPR tahun 2020 adalah sebesar 67,34%, Realisasi kerja Dinas PUPR masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 84%, dengan efisiensi anggaran sebesar 88,57%.
7. Secara umum, pencapaian target mengalami kendala dikarenakan adanya dampak yang sangat luar biasa dikarenakan Covid-19 dan adanya beberapa hambatan kinerja berupa perubahan target akibat recofusing anggaran yang lebih dari 50 persen dari anggaran semula.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Diperlukan perencanaan yang lebih matang sesuai dengan tingkat kebutuhan terutama dalam estimasi material untuk mengantisipasi jika terjadi kelangkaan distribusi material tertentu serta pengawasan teknis yang mengacu pada pengendalian mutu dan kualitas kerja,
2. Perencanaan Program yang mengacu pada skala prioritas dan mengoptimalkan dana yang ada pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penanganan segera,
3. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan serta mengupayakan sumber dana lain diluar APBD dan APBN,
4. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait,
5. Melakukan pembenahan dan penataan aset di bidang infrastruktur.